

## **1) Urusan Sosial**

### **a) Capaian Kinerja Urusan Sosial**

#### **(1) Kondisi Umum**

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021– 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Dinas Sosial memiliki fungsi yang cukup luas

dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial;
- c. Perumusan kebijakan teknis sosial;
- d. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan/nonperizinan dibidang sosial;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja dibidang sosial;
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial;
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan sosial;
- i. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada dinas;
- l. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada dinas;
- m. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- n. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dinas.

**Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (2026)**

No	Indikator Kinerja Sasaran*	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS	orang	73.875	71.667	40.686	143%	70.668	100%

\*Indikator Kinerja Sasaran diisi Indikator Kinerja Sasaran PD (IKU PD) dan Sasaran Daerah (IKU Pemda) bila mengampu.

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2022 berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul sebesar 11,34% dari target RPJMD tahun 2022 sebesar 13,37%. Prosentase kemiskinan di Kabupaten Bantul menurun sebesar 2,03% dengan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2022 sebesar 73.689 dari target renstra sebesar 72.296. Akselerasi penurunannya cukup baik setelah merangkaknya pasca pandemi. Sedangkan tahun 2023 angka kemiskinan berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul menurun

sebesar 11,04% dari target RPJMD sebesar 12,90%. Prosentase kemiskinan di Kabupaten Bantul menurun sebesar 1,86%. Realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah 40.686 atau 143% dari target 71.667. Penurunan jumlah PPKS yang signifikan antara lain disebabkan oleh jumlah fakir miskin (miskin ekstrim sesuai dengan SK Bupati) yang turun dari tahun sebelumnya. Selain dari angka kemiskinan, juga updating data menurunnya:

<b>Jenis PPKS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Selisih Penurunan</b>
Anak Balita Terlantar	21	35	-14
Anak Terlantar	574	579	-5
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	6	112	-106
Anak Jalanan	2	0	2
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	539	515	24

Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	113	0	113
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	120	18	102
Lanjut Usia Terlantar	5363	4614	749
Penyandang Cacat/disabilitas	7983	7254	729
Tuna Susila	9	8	1
Gelandangan	26	22	4
Pengemis	19	16	3
Pemulung	94	87	7



Korban Minoritas	0	0	0
Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	41	56	-15
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	125	1248	-1123
Korban Penyalahgunaan NAPZA	60	162	-102
Korban Trafficking	0	0	0
Korban Tindak Kekerasan	232	23	209
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	52	34	18
Korban Bencana Alam	222	612	-390

Korban Bencana Sosial	0	0	0
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2667	2372	295
Fakir Miskin	54539	22127	32412
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	882	792	90
Komunitas Adat Terpencil	0	0	0

Formula perhitungan adalah jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hampir seluruh warga miskin ekstrem telah menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam program tersebut, warga diberikan bantuan berupa uang tunai. Sementara beberapa warga miskin ekstrem lainnya mendapatkan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yakni bantuan sembako atau yang saat ini dicairkan dalam bentuk uang tunai. Beberapa program yang dilakukan antara lain melalui jaminan kesehatan dan pemberian makanan bergizi dalam program Boga Sehat. Program jaminan kesehatan tersebut tidak bisa ditawarkan. Karena lansia selalu berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

**(2) Permasalahan dan Solusi**

<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>
Penanganan PPKS membutuhkan pendataan PPKS yang akurat sedangkan data pps sangat dinamis.	Updating data PPKS yang melibatkan sampai tingkat wilayah kalurahan dan dusun.
Penanganan pemenuhan standar pelayanan minimal yang belum dapat terakomodir semua komponen embiayaannya sesuai permensos nomor 9 tahun 2028.	Menggunakan anggaran APBN untuk mutu layanan permakanan, kesehatan, dan pendidikan sebagai tambahan. Menggunakan kerjasama jejaring mitra dinsos untuk penanganan rehabilitasi sosial dasar yaitu dengan LKS, dengan Sentra, dan relawan sosial yang tergabung dalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

**b) Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.**

Alokasi anggaran urusan sosial tahun 2023 sebesar Rp 21.240.473.421 yang dibagi dalam 6 program, 14 kegiatan, dan 52 sub kegiatan.

Realisasi belanja tahun 2023 adalah Rp 21.019.447.954 atau 98,96% dan realisasi fisik sebesar 99,97%. Deviasi fisik berasal dari indikator kinerja Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Deviasi keuangan berasal dari indikator kinerja Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Selanjutnya rincian capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan dalam tabel berikut:



Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Bidang Sosial	Dinas Sosial		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	83
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen (%)	80	83
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	4
				Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	37	37
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	9	9
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatu	Angka	82	82
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	Persen (%)	80	80
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	1	1
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2
				Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai AKIP	Persen (%)	80	80
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dokumen	1	1
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia	Laporan	2	2
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	2	2
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	12	12



No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Pelayanan Umum Kantor	Disediakan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	12
				Sub Kegiatan Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	21
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen (%)	70	70
				Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	Kelompok	35	35
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Persen (%)	80	80
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	75
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	17
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100	100
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	35	35



No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	12	12
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial	Persen (%)	75	75
				Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Persen (%)	100	100
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1
				Sub Kegiatan Pengamanan Taman	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan			12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	12	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen (%)	70	70
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Persen (%)	100	100
				Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	930	992
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50
				Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50



No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	Persen (%)	75	75
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen (%)	60	60
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan	Persen (%)	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Kota	Bantuan Sosial			
				Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	50.000	50.000
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	100	100
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100	100
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen (%)	100	100
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Persen (%)	80	80



No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50
				Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1
				Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	4
				Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Persen (%)	75	75

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan*	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	36	36
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	137	137

\* Kebijakan diisi sesuai tisi PD yang ada dalam Perbup SOTK